

**PENGARUH PDRB, INVESTASI, UPAH DAN INFLASI TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA TAHUN 2008-2013**

DRAFT SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna mencapai gelar Sjana Ekonomi

Oleh:

Melia Elmi Lavianty

114030020



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2016

**PENGARUH PDRB, INVESTASI, UPAH DAN INFLASI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PULAU JAWA TAHUN 2008-2013**

DRAFT SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Bandung, Oktober 2016

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana. Ms

Dekan Fakultas Ekonomi



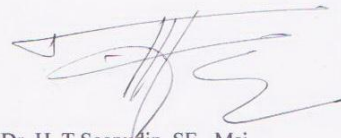
Dr. Atang Hermawan, SE., Msie. AK

Pembimbing Pendamping



Hj. Neni M. Santoso, SE., Msi

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. H. T Saepudin. SE., Msi

ABSTRAK

Pulau Jawa mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia dibandingkan dengan luar Jawa. Kepadatan penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Pulau Jawa juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja. Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari faktor - faktor yang mempengaruhinya, seperti PDRB, investasi, upah dan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, investasi, upah dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2008-2013 baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder 6 provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur) tahun 2008-2013. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model regresi *fixed effect*. Data diolah dengan menggunakan *Eviews 6*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 2) Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) Upah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara simultan bahwa PDRB, investasi, upah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti mampu menjelaskan 99,92 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya 0,08 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi

ABSTRACT

Java Island had the largest employment rate in Indonesia compared to the outer islands. The population density in Indonesia terkonsentrasi in Java. The population of the island of Java was also followed by an increase in the labor force. Efforts to increase employment must not be separated from the factors - factors that influence it, such as the Gross Regional Domestic Product (GRDP), investment, wages and inflation. This study aims to determine the effect of the GRDP, investment, wages and inflation in the labor market in the island of Java in 2008-2013 either partially or simultaneously.

This research is associative causal research with quantitative approach. The data used are secondary data from six provinces in Java (DKI Jakarta, West Java, Banten, Central Java, Yogyakarta and East Java) 2008-2013. The analysis uses panel data regression analysis with fixed effect regression model. Data were processed using Eviews 6.

The results showed that: 1) GRDP partially positive and significant impact on employment; 2) The investment is partially positive and significant impact on employment; 3) Wages partially no significant effect on employment; 4) Inflation partially negative and significant effect on employment. While simultaneously that the GDP, investment, wages and inflation have a significant effect on employment. The coefficient of determination (R^2) showed that the independent variables studied were able to explain 99.92 percent on employment and the remaining 0.08 percent is explained by other variables not examined.

Keywords: Labor force absorption, Gross Regional Domestic Product, Investment, Wages and Inflation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2014 akan mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan 1.49% per tahun. Penduduk sebagai tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya tenaga kerja yang memiliki kualitas yang mampu membantu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Terutama upaya penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja, kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, yaitu : (1) tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa, dan (2) tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam jangka panjang, atau dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan (Suroto, 1992).

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama, strategi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dalam masa pemerintahannya. Penyerapan tenaga kerja atau biasa disebut sebagai *pro-job* menjadi agenda penting selain *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), dan *pro-growth* (peningkatan pertumbuhan) (Kuncoro, 2012:73). Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia semakin lama semakin bertambah diiringi dengan penambahan angkatan kerja yang menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini bisa dilihat antara lain yang disebabkan belum berfungsinya sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis.

Kepadatan penduduk di Indonesia lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa tercatat sebagai pulau dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Alex Sumarno mengatakan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga kompetisi di dunia kerja di Pulau Jawa lebih tinggi (Sindonews, 2014). Jumlah penduduk di wilayah Pulau Jawa juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja. Kontribusi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan luar Pulau Jawa. Penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2012 sebesar 58,53% dari seluruh penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa sebesar 58,52% dari seluruh penyerapan tenaga kerja di Indonesia (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1

Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi

Tahun 2012-2013 di Pulau Jawa dan Luar Jawa (Tahun 2000=100)

Tahun	Lokasi	PTK (orang)	Kontribusi (%)	PDRB (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)	Investasi (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)	Upah (Juta Rupiah)	Inflasi (%)
2012	P. Jawa	64.848.144	58,53	1.442.493	50,04	749	60,90	2,532	4,30
	L. Jawa	45.960.010	41,47	1.439.980	49,95	481	39,10	2,424	4,33
2013	P. Jawa	64.841.414	58,52	1.531.326	50,04	1.051	54,33	2,631	7,89
	L. Jawa	45.962.627	41,48	1.528.665	49,95	884	45,67	2,511	8,82

Sumber: BPS, diolah

Keterangan:

P. Jawa = Pulau Jawa

L. Jawa = Luar Jawa

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Dilihat dari prestasi ekonominya Pulau Jawa memberikan kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan luar Pulau Jawa. Dilihat dari tabel 1.1 kontribusi PDRB Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menunjukkan angka yang sama atau sebesar 50,04% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 49,95%. Hal ini dikarenakan industri-industri kecil/sedang/besar terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menyebabkan Pulau Jawa memiliki peran yang penting bagi perekonomian secara nasional.

Potensi investasi di Pulau Jawa lebih menjanjikan dibandingkan luar Pulau Jawa. Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan investasi di luar Pulau Jawa jika bukan pemerintah yang mengadakan, investor tidak mau melakukan investasi karena investasi di luar Jawa pengembaliannya lebih lambat dibandingkan dengan investasi di Pulau Jawa (RMOL.com, 2012). Kontribusi nilai investasi di Pulau Jawa pada tahun 2012 sebesar 60,90% dari seluruh investasi di Indonesia, sedangkan pada tahun 2013 kontribusi investasi di Pulau Jawa sebesar 54,33% dari seluruh investasi di Indonesia (lihat tabel 1.1).

Pulau Jawa masih menjadi tujuan para tenaga kerja dari pelosok Indonesia untuk bekerja di Pulau Jawa, salah satunya karena upah di Pulau Jawa lebih tinggi daripada upah di luar Jawa. Hal ini terlihat pada tabel 1.1 pada tahun 2012 upah di Pulau Jawa lebih tinggi daripada upah di luar Pulau Jawa, yakni sebesar 2,532 juta rupiah dibandingkan 2,424 juta rupiah di luar Jawa, begitu juga pada tahun 2013 rata-rata

upah di Pulau Jawa masih lebih tinggi daripada upah di luar Pulau Jawa, yakni sebesar 2,632 juta rupiah dibandingkan 2,511 juta rupiah di luar Jawa.

Inflasi merupakan suatu proses dimana terjadinya kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi yang dihadapi produsen berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena kenaikan harga-harga termasuk kenaikan harga input mengakibatkan meningkatnya biaya produksi apabila biaya produksi meningkat maka produsen akan mengurangi kesempatan kerja yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK) hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Dilihat dari tabel 1.1 inflasi di Pulau Jawa pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 4,3% dan 4,33% masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di luar Jawa sebesar 7,89% pada tahun 2012 dan 8,82% pada tahun 2013.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis berupaya melakukan penelitian dengan judul :“ **Pengaruh PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2013**”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah atau pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaruh PDRB, investasi, upah dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2008-2013.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah penelitian yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh PDRB, investasi, upah dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2008-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis yang berharga terhadap perkembangan ilmu ekonomi pembangunan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis/empiris, diantaranya:

1. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai salah satu media latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Menambah wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keselarasan antara fakta dan dasar teori yang digunakan di dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam menganalisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa, penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

2.1.1 Tenaga Kerja

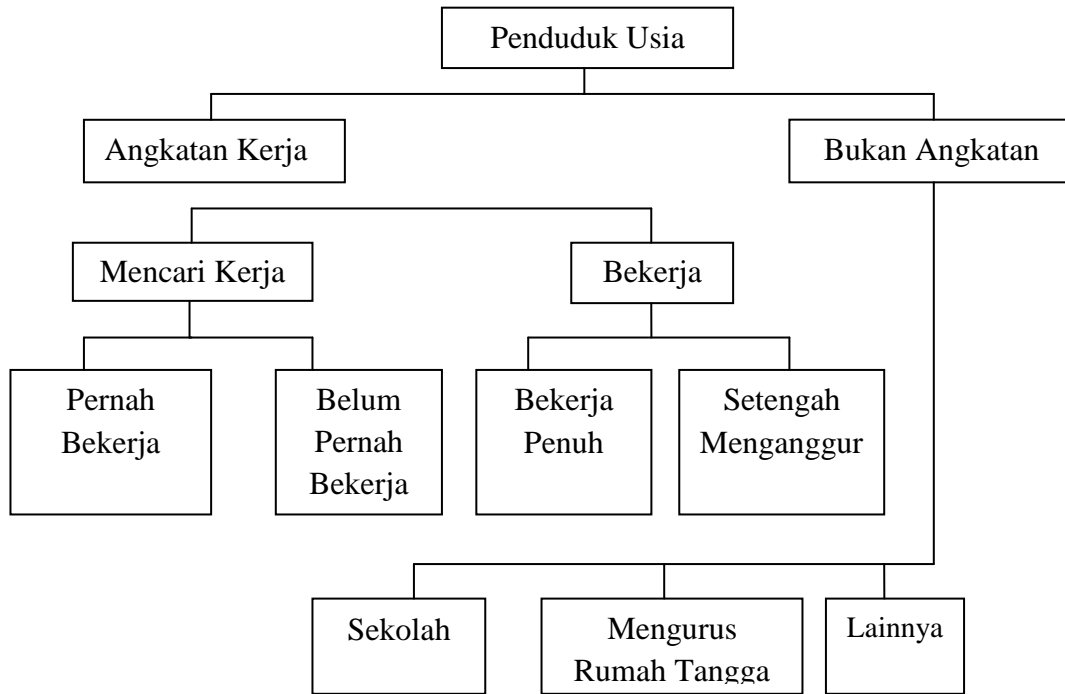
2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang ketenagakerjaan, ketentuan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 tahun.

Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Menurut BPS (2000), bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus-

menerus selama seminggu yang lalu. Sementara yang dimaksud dengan mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum pernah bekerja.

Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah, kelompok yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya (DEPNAKERTRANS, 2007). Golongan yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar kerja sehingga kelompok ini dapat juga disebut sebagai angkatan kerja potensial. Sektor formal didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki badan usaha dengan memiliki tenaga kerja, sedangkan sektor informal adalah usaha yang dilakukan sendiri atau dibantu orang lain dan atau pekerja bebas serta pekerja yang tak dibayar. Penggolongan semua penduduk tersebut dapat dilihat pada diagram ketenagakerjaan.



Sumber: DEPNAKERTRANS (2007)

Gambar 2.1 Diagram Katernagakerjaan

Menurut Swastha (2000) dalam Subekti (2007) tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- a. Tenaga Kerja Eksekutif. Tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinir dan mengawasi.
- b. Tenaga Kerja Operatif. Jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepadanya. Tenaga kerja operatif dibagi menjadi tiga yaitu:

- Tenaga kerja terampil (*skilled labour*)
- Tenaga kerja setengah terampil (*semi skilled labour*)
- Tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*)

2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan (BPS, 2003). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

2.1.2.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan.

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada konsumen. Akan tetapi bagi pengusaha mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa

untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

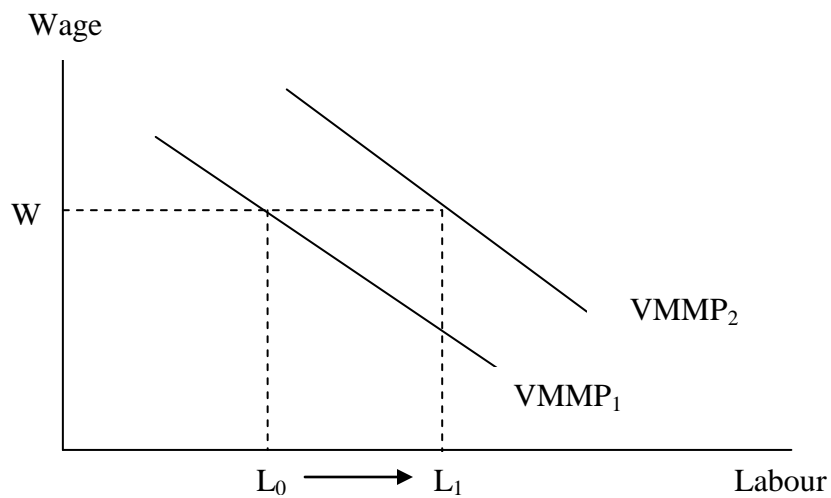
Pengusaha memperkerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Di dalam menganalisis mengenai permintaan perlulah disadari perbedaan di antara istilah “permintaan” dan “jumlah barang yang diminta”.

Menurut Sudarsono (1988) dalam Subekti (2007), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang tercermin dari besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi.

Mengacu pada uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh sektor usaha tertentu di suatu wilayah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang

diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di Pulau Jawa.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga kerja (MPPL), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue* (MR). Penerimaan marjinal disini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = VMPPL = MPPL \cdot P$, dan (3) biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama *Marginal Revenue* (MR) lebih besar dari tingkat upah.



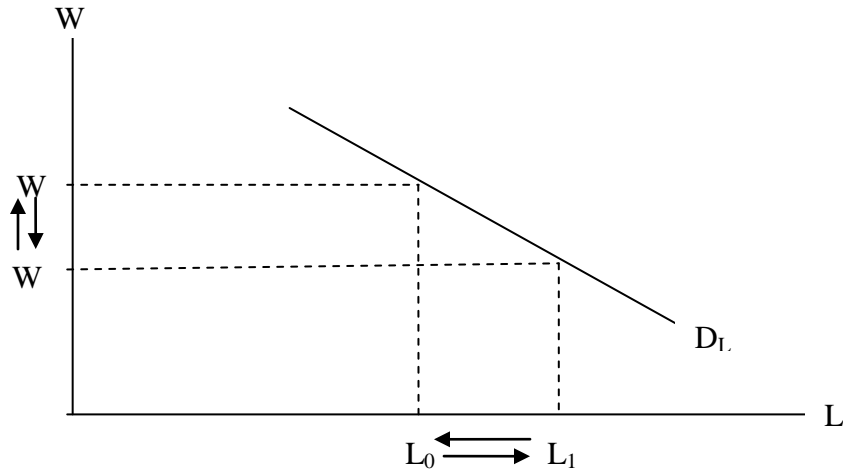
Sumber: Bellante and Jackson (1990)

Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap

Value Marginal Physical Product of Labour (VMPP) adalah nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah harga jual barang per unit, DL adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsi. Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap (Gambar 2.2).

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisme,

sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan masyarakat akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.



Sumber: Bellante and Jackson (1990)

Gambar 2.3 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun

Pengusaha akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja tergantung dari tingkat upahnya. Jika tingkat upah mengalami penurunan, maka pengusaha akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan tingkat upah dapat dilihat pada gambar 2.3. Kurva DL melukiskan besarnya nilai hasil marjinal tenaga kerja (VMPPL) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan antara tingkat upah (W) dan penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik L_1 dan L^* . Pada gambar 2.3 terlihat bahwa pada kondisi awal tingkat upah berada pada W_1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan L_1 . Jika

tingkat upah diturunkan menjadi W^* , maka tenaga kerja yang diminta meningkat menjadi L^* .

2.1.2.2 Pasar Tenaga Kerja

Pasar Tenaga Kerja adalah : seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan.

Penawaran tenaga kerja berasal dari pencari kerja atau rumah tangga konsumen. Kurva penawaran ini memiliki slope positif, yang berarti semakin tinggi upah yang ditawarkan, maka semakin besar pula penawaran tenaga kerja dan sebaliknya. Sementara, permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan pemberi kerja atau rumah tangga produksi. Kurva permintaan memiliki slope yang negatif, yang berarti semakin tinggi upah, maka semakin kecil permintaan terhadap tenaga kerja dan sebaliknya.

Para pelaku di pasar tenaga kerja, terdiri dari :

1. Pencari kerja

Setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan

pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan

2. Pemberi kerja

Perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji

3. Perantara

Media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja dan *head hunters* (Pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, head hunters akan memperoleh prosentasi gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan)

2.1.3 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (1 tahun). Sedangkan unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas dan air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen permintaan akhir tersebut meliputi :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto

4) Perubahan stok

5) Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi disuatu wilayah pada jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

2.1.3.1 Macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) :

Ada dua macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (PDRB riil) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

2.1.3.2 Metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ada berbagai macam cara yang digunakan untuk menghitung PDRB, cara-cara tersebut antara lain:

a. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tidak langsung bisa digunakan apabila data yang diperlukan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak tersedia.

b. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil bukan karena adanya pengaruh harga. Ada 4 cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu (dalam Paramitha G.W.N : 2009):

1) Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Nilai tambahan bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara atas dasar harga konstan.

2) Ekstrapolasi

Menurut ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan tahun tertentu diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar tertentu dengan

indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolasi dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar tertentu dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar tertentu yang diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

3) Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan tahun tertentu diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks yang sesuai.

4) Deflasi berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

2.1.4 Investasi

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan

untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran: 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Di negara-negara sedang berkembang kekurangan modal dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu (Suryana, 2000: 21):

1. Kecilnya jumlah mutlak kapita material
2. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk
3. Rendahnya investasi netto

Akibat keterbatasan di atas, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik, dan mengembangkan sumber daya manusia, misalnya keterampilan dan pelatihan.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Investasi

Jenis-jenis investasi berdasarkan pelaku investasi terbagi menjadi dua:

a. *Autonomous Investment* (Investasi Otonom)

Investasi Otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

b. *Induced Investment* (Investasi Dorongan)

Investasi dorongan adalah investasi yang besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan nasional, diadakannya investasi ini akibat adanya penambahan permintaan, dimana penambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari penambahan pendapatan.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi di antaranya adalah (P.Eko Prasetyo, 2009: 98):

1. Tingkat bunga

Jika tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari bank menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka tingkat investasi akan rendah, karena tingkat kredit dari bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam proyek investasi.

2. *Marginal Efficiency of Capital* (MEC)

Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih kecil daripada tingkat suku bunga riil yang berlaku, maka investasi tidak akan terjadi. Jika MEC yang diharapkan lebih tinggi daripada tingkat bunga riil, maka tingkat investasi akan dilakukan. Jika MEC sama dengan tingkat suku bunga, maka pertimbangan untuk mengadakan investasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Jika ada perkiraan peningkatan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar daripada MEC, maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam (*risk seeking*). Karena investor menganggap bahwa investasi di masa yang akan datang akan memperoleh banyak keuntungan. Sekalipun faktor insting ini bukan faktor utama, tetapi penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dalam mengambil keputusan.

4. Kestabilan Politik Suatu Negara

Semakin stabil kondisi politik suatu negara semakin baik iklim investasi di suatu negara tersebut, sehingga investasi baik dalam bentuk PMA atau PMDN di negara tersebut akan meningkat. Karena dengan suhu politik yang stabil, berarti *country risk* juga rendah yang berarti keuntungan investasi akan semakin baik.

5. Tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh

Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam berinvestasi suatu barang tertentu akan makin besar tingkat investasi tersebut. Namun, secara umum semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi juga semakin tinggi resikonya.

6. Faktor-faktor lain

Selain kelima aktor tersebut, investasi juga cukup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: tingkat kemajuan teknologi, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang, dan tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.

Fasilitas modal yang pada umumnya disebut sebagai penanaman modal atau investasi dapat berasal dari 2 sumber, diantaranya menurut (Salvatore, 1997):

a. Investasi Asing (PMA)

Investasi asing atau biasa disebut Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah suatu bentuk penghimpunan modal guna menunjang proses pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Biasanya, PMA terdiri atas:

- 1) Investasi portofolio (*portofolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya
- 2) Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

b. Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Investasi Dalam Negeri atau biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah suatu bentuk upaya dalam rangka menambah modal guna menunjang pembangunan nasional maupun wilayah melalui investor dalam negeri. Modal yang diperoleh dari dalam negeri ini dapat berasal dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Undang-undang yang mengatur PMDN di Indonesia pertama kali ditetapkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 12 Tahun 1970 juga mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Baik PMA maupun PMDN keduanya merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Modal PMDN, pembangunan suatu bangsa memerlukan dana untuk melaksanakan investasi yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan pada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari Luar Negeri tidak mungkin diandalkan selamanya untuk pembangunan. Untuk itu perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan investasi yang bersumber dari dalam negeri. Modal investasi dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung antara lain adalah (Endar Supriyanto, 2006: 21) :

1). Secara langsung

Penanaman modal secara langsung bersumber dari pemilik sendiri. Dalam menjalankan usaha pasti seorang investor yang memiliki modal awal dari miliknya sendiri selain modal dari pihak lain.

2) Secara tidak langsung

a) Lembaga Perbankan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan. Dengan adanya simpanan masyarakat yang ada di bank-bank maka investor dapat meminjam dana investasi dari bank-bank yang ada. Dana dari perbankan bersifat jangka pendek karena simpanan masyarakat itu merupakan deposito berjangka yang pengambilannya sudah ditentukan.

b) Pasar Modal

Dipandang sebagai salah satu sarana yang juga efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana masyarakat untuk disalurkan kepada investor. Pasar modal merupakan alternatif sumber dana bagi pembiayaan proyek investasi. Dana dari pasar modal merupakan dana yang bersifat jangka panjang.

2.1.5 Upah

Upah merupakan balas jasa tenaga kerja yang diberikan oleh produsen atau perusahaan sebagai imbalan atas hasil jasa tenaga kerja dalam memproduksi barang ataupun jasa. Upah juga merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat hidup pekerja. Upah riil pekerja merupakan suatu upah yang telah disesuaikan dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan penduduk secara umum.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial dan tenaga kerja menjelaskan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:

- a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
- b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
- c) Produktivitas marginal tenaga kerja.
- d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
- e) Perbedaan jenis pekerjaan.

2.1.5.1 Teori Upah Tenaga Kerja

Upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja.

1) Teori Upah Wajar (alami) dari David Ricardo

Tingkat upah sebagai balas jasa bagi tenaga kerja merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa perbaikan upah hanya ditentukan oleh perbuatan dan perilaku tenaga kerja sendiri dan pembentukan upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar. Teori ini menerangkan:

1. Upah menurut kodrat upah adalah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah menurut kodrat. Oleh para ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

2) Teori Upah Besi

Teori upah ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini

dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.

3) Malthus

Malthus merupakan salah satu seorang tokoh klasik yang meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Menurut Malthus, jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang dipakai untuk menjelaskan berbagai hal. Malthus menyatakan bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah sehingga dapat menekan tingkat upah. Demikian juga sebaliknya, tingkat upah akan meningkat jika penawaran tenaga kerja berkurang akibat jumlah penduduk yang menurun.

Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi (UMP). Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Undang-undang upah minimum menetapkan upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw, 2007). Alasannya yaitu pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja

yang kurang terdidik dan kurang pengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah.

Upah nominal yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Upah riil adalah standar upah minimum dengan mempertimbangkan harga-harga yang berlaku. Perubahan upah riil akan memengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja. Jika upah riil naik, biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk menjadi lebih tinggi, akibatnya *output* yang dihasilkan berkurang dan berdampak pada berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja.

2.1.6 Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara-negara di dunia adalah inflasi. Pengertian inflasi dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Pengertian inflasi dalam arti sempit atau relatif didefinisikan sebagai suatu periode dimana kekuatan membelik satuan moneter menurun atau terjadi kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa (secara umum) secara terus menerus. Jika kenaikan barang dan jasa hanya satu atau beberapa macam maka tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, begitu juga kenaikan barang dan jasa yang bersifat kejutan (sekali waktu musiman) pada hari raya Islam dan Natal juga tidak dapat dinamakan dengan inflasi (Kusnadi, 1996 : 276 dalam Paramitha, Gesha W.N. 2009).

b. Pengertian inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu kenaikan relatif dan sekonyong-konyong yang disproportional besar dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito (deposit Currency) dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang. Suatu kenaikan normal dalam tingkat harga setelah suatu periode depresi umumnya tidak dianggap sebagai keadaan inflasi (Winardi, 1995 : 235 dalam Rahayu, Tri Susanti, 2005). Ada dua teori yang membahas tentang inflasi, yaitu :

1. Teori Kuantitas

Teori ini dikenal teori Kaum Moneteris (*monetaris models*) yang menekankan pada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Proses perebutan rezeki antar golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah

barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung.

2.1.6.1 Jenis-jenis Inflasi

Dalam teori ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu :

a. Penggolongan inflasi atas derajat parah tidaknya inflasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu (Kusnadi, 1996 : 227 dalam Paramitha, Gesha W.N. 2009) :

1) inflasi ringan dibawah 10%

2) inflasi sedang antara 10% - 30%

3) inflasi tinggi antara 30% - 100%

4) hyperinflation diatas 100%

b. Penggolongan inflasi didasarkan pada penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu (Boediono, 2000 :162) :

1) *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat permintaan masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pada barang. Inflasi yang seperti terjadi disebabkan oleh adanya suatu kenaikan permintaan pada beberapa jenis barang. Dalam hal ini, untuk permintaan masyarakat akan meningkatkan secara agregat atau aggregate

demand. Adanya peningkatan permintaan ini bisa terjadi karena terjadi peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah, terjadi kenaikan permintaan terhadap barang yang diekspor, dan terjadi kenaikan permintaan barang untuk kebutuhan pihak swasta. Peningkatan permintaan yang muncul dimasyarakat atau aggregate demand ini dapat mengakibatkan harga-harga menjadi naik yang disebabkan oleh adanya penawaran tetap.

2) *Cost push inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena penurunan penawaran agregat sehingga bergesernya kurva agregat penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya agregat penawaran adalah meningkatnya biaya produksi di pasar faktor produksi sehingga menaikkan harga komoditas di pasar komoditas. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

c. Penggolongan inflasi menurut asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu (Boediono, 2000 : 162) :

1) *Domestic Inflation*, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik disektor riil maupun disektor moneter dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Inflasi tarikan permintaan dapat terjadi akibat permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi.

Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi tersebut kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment.

2) *Imported Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan harga-harga komoditi diluar negeri (dinegara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi desakan biaya dapat terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (*input*) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik.

2.1.6.2 Cara Mengatasi Inflasi

Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal atau kebijakan lainnya.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan penetapan persediaan kas : Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mewajibkan bank-bank umum dapat diedarkan oleh bank-bank umum menjadi sedikit. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan.

- Kebijakan Diskonto : Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan Kebijakan Diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.
- Kebijakan Operasi Pasar Terbuka : melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.
- Kebijakan Rasio Cadangan Wajib :Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan itu antara lain sebagai berikut.

- Menghemat pengeluaran pemerintah : Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.
- Menaikkan tarif pajak : Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.

3. Kebijakan Lain di Luar Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara-cara dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut..

- Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar : Untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan produksi. Hal itu dapat ditempuh, misalnya, dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea masuk barang impor.
- Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang : Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap (black market).

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung dari parah atau tidaknya inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan maka justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang lebih bergairah dalam bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (*hiperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak semangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin

akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil). Secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi disuatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

A. I Gusti Agung Inradewa dan Ketut Suardhika Natha

Hasil penelitian I Gusti Agung Inradewa dan Ketut Suardhika Natha (2015), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia yang berjudul “ Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali” menunjukkan bahwa secara bersama-sama inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Demikian juga dengan $R^2 = 0.960$ berarti bahwa 96.0 persen penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dipengaruhi bersama-sama oleh inflasi, PDRB dan upah minimum sedangkan sisanya sebesar 4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara PDRB dan upah minimum positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dalam mengatur laju inflasi dan penentuan upah minimum juga dirasakan perlu agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

B. Penelitian Dimas dan Nenik Woyanti

Hasil penelitian Dimas dan Nenik Woyanti (2009), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang berjudul “Pengaruh PDRB, Upah Riil, dan Investasi riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta” menunjukkan secara serempak PDRB, Upah Riil, dan Investasi riil berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga dengan $R^2 = 0,84$ berarti bahwa 84 persen penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta dipengaruhi sama-sama oleh variabel PDRB, upah riil dan investasi riil sedangkan sisanya sebesar 16 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara parsial upah riil dan investasi riil tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja dalam hal PDRB, upah riil, dan investasi riil. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mendorong dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan di setiap sektor, perlu mengatasi masalah pengupahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha dan pemerintah daerah hendaknya lebih efektif dalam memberikan ijin bagi investor terkait dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja.

C. Penelitian Arifatul Husna

Hasil penelitian Arifatul Husna (2013), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pengaruh Laju

Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011” menunjukkan secara serempak Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga dengan $R^2 = 0,923388$ berarti bahwa 92 persen penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi sama-sama oleh variabel laju pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah sedangkan sisanya sebesar 8 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara parsial laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sementara investasi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong sektor industri untuk lebih meningkatkan kegiatan agar dapat memacu dan mendukung laju pertumbuhan sektor industri. Hal ini dapat dapat didukung dengan semakin meningkatnya investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah akan menjadi pertimbangan bagi pengusaha sehingga dalam penetapan upah pemerintah perlu memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar tenaga kerja.

D. Penelitian Apri Cahyono

Hasil penelitian Apri Cahyono (2015), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2013” menunjukkan Secara serempak upah

minimum, produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di karesidenan Surakarta tahun 2006-2013. Demikian juga R^2 sebesar 0,980419, artinya 98,04 persen variasi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik, upah minimum, produk domestik regional bruto, dan inflasi, sisanya 1,96 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Secara parsial bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di karesidenan Surakarta tahun 2006-2013. Bagi pihak-pihak yang berkompeten, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) hendaknya lebih bijak dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah khususnya menyangkut ketenagakerjaan. Bagi masyarakat, hendaknya lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA sehingga kualitas tenaga kerja dalam negeri dapat bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pulau Jawa tercatat sebagai pulau dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hal ini terjadi karena wilayah Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa disebabkan karena perkembangan ekonomi yang pesat serta sebagai pusat pemerintahan yang dianggap mampu memberikan segala kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan. Pulau Jawa telah menjadi tempat tujuan perpindahan

penduduk yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah angkatan kerja.

Penyerapan tenaga kerja aktif terjadi pada wilayah dimana aktivitas ekonomi yang tinggi. Tolok ukur aktivitas ekonomi suatu wilayah pada waktu tertentu digambarkan oleh besarnya PDRB. PDRB Pulau Jawa lebih besar daripada PDRB luar Jawa (lihat tabel 1.1) hal ini disebabkan karena Pulau Jawa terkonsentrasi industri-industri seperti industri besar, sedang dan kecil sehingga Pulau Jawa memiliki peran yang penting dalam perekonomian secara nasional. Meningkatnya jumlah PDRB yang berarti meningkatnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor produktif dan menurunkan jumlah pengangguran, begitu juga sebaliknya.

Investasi merupakan faktor menunjang dalam penyerapan tenaga kerja karena investasi merupakan roda penggerak suatu kegiatan usaha. Untuk menggerakkan roda usaha dibutuhkan tenaga kerja di samping modal yang ditanam (investasi). Potensi investasi di Pulau Jawa lebih menjanjikan dibandingkan luar Jawa maka dari itu banyak para investor yang berlomba-lomba menanamkan modalnya di Pulau Jawa daripada luar Jawa karena menginvestasikan modal di Pulau Jawa lebih cepat menghasilkan keuntungan. Tingginya nilai investasi di Pulau Jawa dibandingkan luar Jawa dikarenakan kualitas sumber daya serta infrastruktur yang lebih baik untuk di wilayah Pulau Jawa. Ketika nilai investasi di Pulau Jawa semakin besar maka semakin besar jumlah penyerapan tenaga kerja sektor produktif karena dengan banyaknya

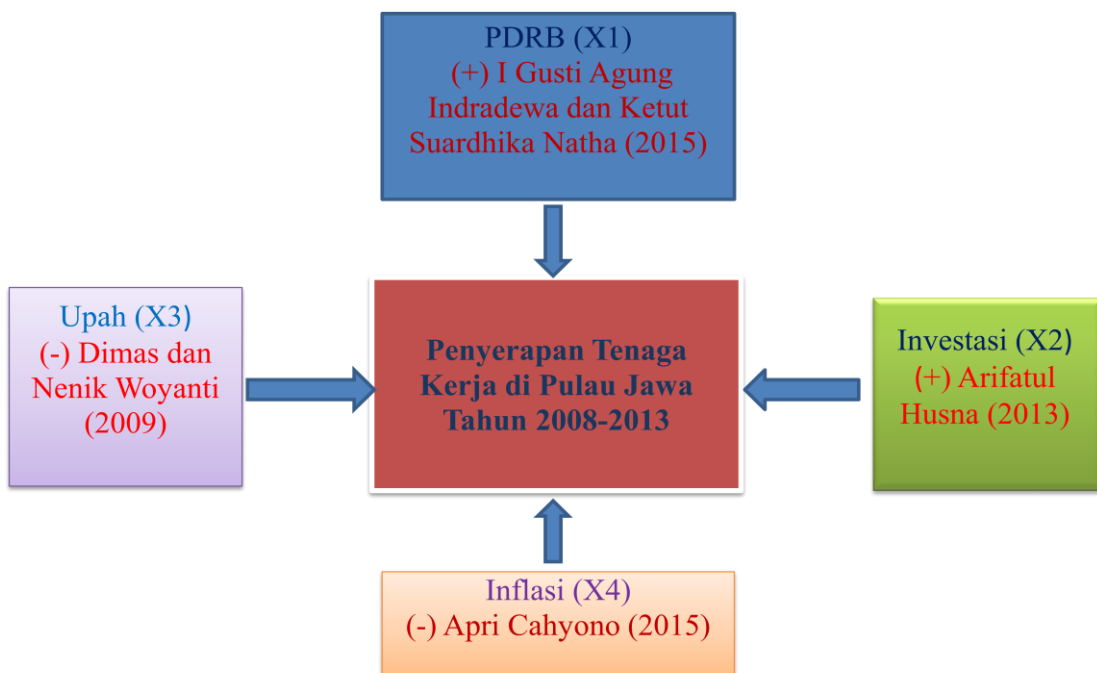
investasi maka sektor usaha mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

Seseorang bekerja pasti mengharapkan balas jasa berupa upah. Suatu daerah/wilayah yang memiliki tingkat upah tinggi akan menarik para pendatang untuk bekerja di daerah/wilayah tersebut. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang memiliki tingkat upah lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa, sehingga banyak pendatang dari luar Jawa untuk bekerja di Pulau Jawa dengan harapan mendapatkan upah jauh lebih tinggi. Tingginya tingkat upah di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja. Tingkat upah tinggi merupakan beban bagi pengusaha, penetapan tingkat upah yang tinggi oleh Pemerintah akan menurunkan keuntungan perusahaan akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/rasionalisasi tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah mendorong pengusaha menggunakan teknik yang cenderung padat modal dalam proses produksinya agar tercapai tingkat produktivitas yang lebih besar sehingga mengorbankan para pekerja.

Inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang tinggi mengakibatkan tingginya harga-harga input yang menjadi beban produsen sehingga biaya produksi meningkat maka produsen akan mengurangi kesempatan kerja. Pulau Jawa memiliki rata-rata inflasi rendah dibandingkan dengan inflasi luar Jawa (lihat tabel 1.1) artinya pengendalian harga di Pulau Jawa ini cukup terkendali di seluruh kota, sedangkan di luar Jawa tingkat inflasi masih cukup tinggi artinya pengendalian harga di luar pulau Jawa ini masih perlu ditingkatkan. Semakin

besarnya tingkat inflasi berarti semakin berkurang kemampuan sektor usaha dalam penyerapan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, semakin kecilnya tingkat inflasi maka semakin besar kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:



Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, dapat disimpulkan beberapa hipotesis antara lain :

1. PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
2. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
3. Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
4. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal “*Realisasi Investasi*”2008-2013. BKPM, Jakarta.
- Cahyono, Apri. 2015. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja di Eks Karesiden Surakarta Tahun 2006-2013*”. Jurnal Ilmiah. IESP Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Dimas. Nenek Woyanti. 2009. “*Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 32-41.
- Dian Novianti Sitompul. 2013. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sumatera Utara*”. Jurnal Universitas Negeri Medan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 1994. Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi dan Sidang Sarjana, Bandung.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husna, Arifatul. 2013. “*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*”. (Skripsi) Universitas Negeri Semarang.

- Indradewa, I Gusti Agung & Ketut Suardhika Natha. 2015. *“Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”*. (Skripsi) Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Kholifa, Anggrainy. 2013. *“Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi”*. Jurnal Ilmiah. FEB Universitas Brawijaya, Malang.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priambodo, Luthfi Setiya. 2014. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang Tahun 1993-2012”*. (Skripsi) Universitas Ponogoro, Semarang.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus (terj.), (1993), *“Pengantar Ekonomi”*, Edisi Kedua belas, Erlangga, Jakarta.
- Sumarsono, Sony. 2003. *“Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan”*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadono, Sukirno. 2001. *Pengantar Teori Makro*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- _____ Badan Pusat Statistika (BPS) *“Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka”*. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistika (BPS) “*Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistika (BPS) “*Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistika (BPS) “*Provinsi D.I Yogyakarta Dalam Angka*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistika (BPS) “*Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistika (BPS) “*Provinsi Banten Dalam Angka*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi. “*Statistika Indoneisa (Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu)*”. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2016. BKPM: Pulau Jawa Masih Serap Tenaga Kerja Terbesar.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/10/090743767/bkpm-pulau-jawa-masih-serap-tenaga-kerja-terbesar>

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN). 2012. Investasi Luar Jawa Butuh

Rangsangan Tax Holiday.

<http://ekbis.rmol.co/read/2012/07/31/72974/Investasi-Luar-Jawa-Butuh->

[Rangsangan-Tax-Holiday-](#)